

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2007-2017. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab V maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi (R^2) adalah variabel independen yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memperoleh angka sebesar 0.606105 atau sebesar 60,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 39,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
- 2) Dan secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2007 – 2017.
- 3) Provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau *gini ratio* yang tertinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan sedangkan provinsi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau *gini ratio* yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan bagi pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera adalah sebagai berikut :

- 1) Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi Pulau Sumatera tergolong dalam kategori sedang, di hararapkan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota dapat membuat kebijakan ekonomi maupun non ekonomi untuk meratakan dan memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara memaksimalkan setiap potensi di setiap daerah secara berkelanjutan seperti mengembangkan potensi SDM dan SDA yang ada agar penduduk lebih berproduktif.
- 2) Pemerintah diharapkan mampu mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah mereka. Walaupun angka usia harapan hidup provinsi di Sumatera tergolong tinggi, akan tetapi masih ada komponen lain dalam membentuk IPM, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat. Program-program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan IPM, sebaiknya ditinjau ulang apakah program tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Upaya peningkatan IPM sebaiknya difokuskan pada masyarakat dan daerah-daerah yang lebih membutuhkan agar program tersebut tepat sasaran. Dengan meningkatnya angka IPM diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera.
- 3) Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, jadi pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi dalam melaksanakan tahap-tahap untuk mencapai pembangunan yang merata. Sehingga pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta pencapaian yang

diinginkan dan dapat mengurangi angka ketimpangan di setiap daerah.

- 4) Agar tingkat upah minimum provinsi sesuai dengan kebutuhan serta kinerja para pekerja maka pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan SDM, misalnya dengan memberikan pelatihan agar angkatan kerja memiliki keahlian di bidang pekerjaannya dengan mendorong investasi yang bersifat padat karya agar pendapatan dari masyarakat (khususnya menengah kebawah) meningkat, hal ini juga dapat menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran.

